

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Manfaat.....	10
1.5. Metode penelitian .....	10
1.5.1 Tipe Penelitian .....	10
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.6. Sumber Bahan Hukum .....	12
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	12

1.6.2	Bahan Hukum Sekunder .....	13
1.7.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.8.	Analisis Bahan Hukum.....	14
1.9.	Pertanggungjawaban Sistemika.....	14
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENERBANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 .....		16
2.1.	Keterlambatan Penerbangan (Delay).....	17
2.1.1	Pengaturan Keterlambatan Penerbangan (Delay) Menurut Ketentuan Internasional .....	19
2.1.1	Peraturan Keterlambatan Penerbangan (Delay) menurut Ketentuan Nasional.....	22
2.1.2	Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan Di Masa Pandemi COVID-19 .....	24
2.2.	Pembatalan Penerbangan ( <i>Cancellation of Flight</i> ).....	32
2.3.	<i>Denied Boarding Passenger</i> .....	39
2.4.	Definisi <i>bodily injury</i> dalam ketentuan ganti kerugian .....	50
2.4.1	Definisi Kecelakaan Dalam Pengangkutan Udara .....	55
BAB III KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENYELAMATKAN INDUSTRI PENERBANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 .....		63
3.1.	Koordinasi Kebijakan Pembuat Regulasi dengan Sektor Penerbangan di Masa Pandemi COVID-19 .....	66
3.1.1	Status Kedudukan Satuan Tugas COVID-19 dalam Pembuatan Peraturan yang Berkaitan dengan Sektor Penerbangan.....	67

3.1.2 Koordinasi Pembuat Kebijakan oleh Pemerintah dengan Pelaku Jasa Penerbangan .....	75
3.2. Asuransi Sebagai Solusi Bagi Perusahaan Maskapai Dalam Menghadapi Potensi Gugatan Oleh Penumpang Yang Tertular COVID-19 .....	79
3.3. Stimulus Penyelamatan Perusahaan Maskapai Nasional .....	85
3.3.1 Subsidi.....	88
3.3.2 Suntikan Dana ( <i>Bailout</i> ).....	93
BAB IV PENUTUP .....	101
4.1. Kesimpulan.....	101
4.2. Saran.....	102
DAFTAR BACAAN.....	104

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 716

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1823

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405

Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

*Montreal Convention 1999 Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air*

*Regulation EC No. 261/2004 of The European Parliament and of The Council of 11 February 2004, Establishing Common Rules on Compensation and Assistance to Passenger in the Event of Denied Boarding and of Cancellation or Long Delay of Flights, and Repealing Regulation (EEC) No. 295/91*

*International Standar and Recommended Practices Aircraft Accident Investigation Annex 13 The Convention on International Civil Aviation*